



RENCANA STRATEGIS

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

2020 - 2024

(Revisi Tahun 2022)

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPN Pekalongan) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran/turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Renstra ini, disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang memuat, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan fungsi PPN Pekalongan.

Renstra PPN Pekalongan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPN Pekalongan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PPN Pekalongan periode 2015-2019, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, serta visi Indonesia, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf PPN Pekalongan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra PPN Pekalongan periode 2020-2024 yaitu “Terwujudnya PPN Pekalongan sebagai sentra perikanan terpadu”

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra 2020-2024 PPN Pekalongan ini banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Renstra PPN Pekalongan 2020-2024 ini dapat direalisasikan sesuai rencana yang ditetapkan. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Pekalongan, 10 Januari 2022

Pelabuhan Perikanan
Nusantara
Pekalongan



Kurniansyah, A.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Kondisi Umum.....	7
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
1.3 Tugas dan Fungsi.....	15
1.3.1 Sub Bagian Umum.....	16
1.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional.....	16
1.4 Maksud dan Tujuan.....	17
1.5 Alur Pikir.....	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	19
2.1 Pembangunan Perikanan Tangkap.....	19
2.1.1 Visi Ditjen Perikanan Tangkap.....	19
2.1.2 Misi Ditjen Perikanan Tangkap.....	19
2.1.3 Tujuan Ditjen Perikanan Tangkap.....	19
2.1.4 Sasaran Strategis Ditjen Perikanan Tangkap.....	20
2.2 Pembangunan PPN Pekalongan.....	21
2.2.1 Visi PPN Pekalongan.....	21
2.2.2 Misi PPN Pekalongan.....	22
2.2.3 Tujuan PPN Pekalongan.....	22
2.2.4 Sasaran Strategis PPN Pekalongan.....	22
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	25
BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	28
4.1 Kebijakan dan Strategi.....	28
4.1.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan.....	28
4.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana.....	28
4.1.3 Peningkatan Sistem Informasi Pelabuhan.....	29

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	29
4.2.1 Target Kinerja PPN Pekalongan	29
4.2.2 Kerangka Pendanaan PPN Pekalongan	31
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	33
Lampiran I : Kerangka Pendanaan.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks SWOT Lingkup PPN Pekalongan	25
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Jumlah Produksi PPN Pekalongan 2015-2019	8
Gambar 2 Capaian Jumlah Produksi PPN Pekalongan 2015-2019.....	8
Gambar 3 Capaian PNBP PPN Pekalongan 2015 - 2019.....	10
Gambar 4 Struktur Organisasi PPN Pekalongan	17
Gambar 5 Alur pikir penyusunan Renstra PPN Pekalongan 2020-2024	18

DAFTAR LAMPIRAN

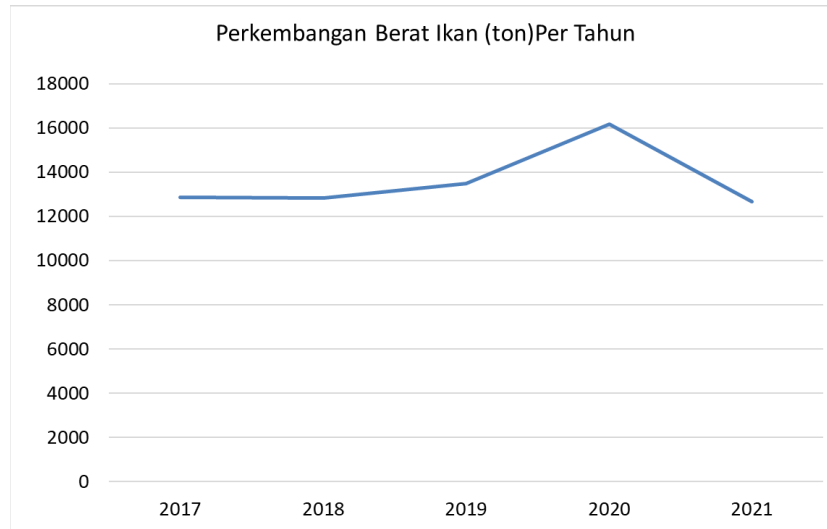
Lampiran 1 Kerangka Pendanaan	34
-------------------------------------	----

1.1 Kondisi Umum

Capaian pembangunan PPN Pekalongan tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. PPN Pekalongan memiliki 8 (delapan) sasaran strategis yakni 1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; 3) Terselenggaranya kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang efektif; 4) Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan yang adil berdaya saing, dan berkelanjutan; 5) Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan yang profesional dan partisipatif; 6) Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) PPN Pekalongan yang kompeten, profesional dan berintegritas; 7) Terwujudnya birokrasi lingkup PPN Pekalongan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima dan 8) Terkelolanya anggaran pengelolaan PPN Pekalongan secara efisien dan akuntabel. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

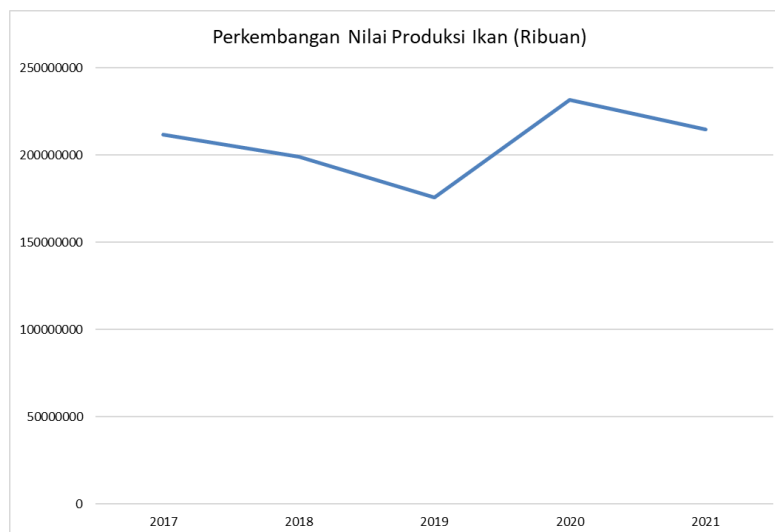
Realisasi rata-rata jumlah produksi perikanan tangkap PPN Pekalongan tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kenaikan rata-rata 0,34% per tahun. Volume produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 12.847,94 ton pada tahun 2017 dan menurun 0,25% menjadi 12.815,64 ton pada tahun 2018. Mengalami kenaikan sebesar 5,26% menjadi 13.490,11 ton pada tahun 2019 dan 16.157,23 ton pada tahun 2020 atau naik 19,77% disbanding tahun 2019, namun di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 21,7% menjadi 12.653,53 ton pada tahun 2021.



Gambar 1 Capaian volume ikan yang didaratkan PPN Pekalongan 2017-2021

Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Capaian nilai total produksi lima tahunan rata-rata nilainya meningkat 0,74% dengan nilai 211.834 miliar ditahun 2017. Ditahun 2018 menurun sebesar 6,01% dengan nilai 199.088 miliar dilanjutkan penurunan sebesar 11,65% dengan nilai 175.502 miliar pada tahun 2019. Kenaikan sebesar 31,70% dengan nilai 231.676 miliar pada tahun 2020 dan menurun lagi sebesar 7,34% dengan nilai 214.657 miliar ditahun 2021.



Gambar 2 Capaian Nilai Produksi PPN Pekalongan 2017-2021

Capaian utama pembangunan PPN Pekalongan juga ditopang oleh pelaksanaan beberapa kegiatan diantaranya Pelaksanaan Kesyahbandaran, Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Penerbitan Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB), Pelayanan Publik dan Sertifikasi ISO 9001, Penetapan dan Reviu Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP), Pengelolaan data dan informasi dalam PIPP, Implementasi Logbook Penangkapan Ikan, PNBP dll.

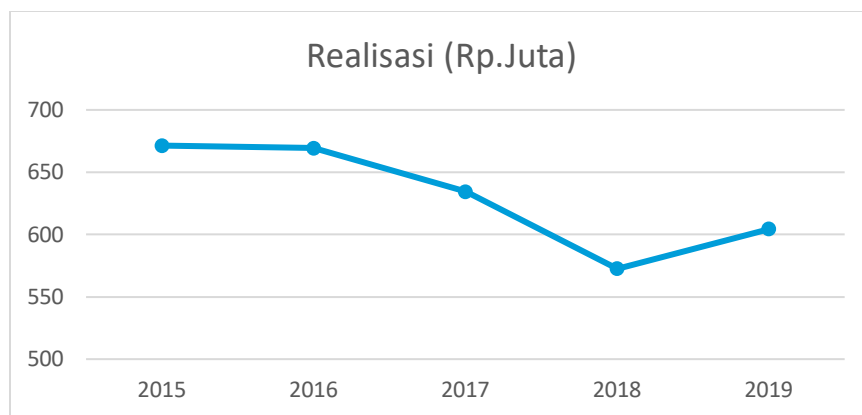
Selama tahun 2015-2019, sebanyak 779 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan telah diterbitkan. Adapun dalam kurun waktu yang sama, juga telah merekomendasikan sebanyak 36 SCPIB.

Dalam rangka pelayanan publik, PPN Pekalongan telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2016 dan 2017 untuk 5 jenis layanan yaitu : Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan – Lembar Awal (SHTI-LA), Wisata Bahari, Inspeksi Pengendalian Mutu (IPM), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal - Kedatangan (STBLKK-Kedatangan). Setahun setelahnya yakni tahun 2018 telah dilakukan upgrading Sertifikat ISO dari 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

Untuk menunjang operasional Pelabuhan Perikanan, kegiatan Reviu Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019.

Penerapan penyampaian Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan telah berjalan baik dengan menggunakan metode penyampaian logbook penangkapan ikan secara manual dan penyampaian logbook penangkapan ikan secara elektronik. Untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT diwajibkan untuk melakukan aktivasi dan penyampaian logbook penangkapan ikan melalui aplikasi E-Logbook sebagaimana tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11/PER-DJPT/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan. Jumlah kapal yang telah melakukan aktivasi di PPN Pekalongan sudah berjalan hampir menyeluruh kepada setiap kapal perikanan > 30 GT yang melakukan operasi penangkapan. Hal ini seiring dengan ketentuan yang diterapkan di Seksi Kesyahbandaran PPN Pekalongan, bahwa setiap kapal > 30 GT yang mengajukan permohonan SPB wajib melakukan aktivasi E-Logbook terlebih dahulu.

Capaian realisasi PNBP dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 tercatat realisasi sebesar Rp.671,36 juta, sempat mengalami kenaikan menjadi Rp.669,45 juta pada tahun 2016, kembali mengalami penurunan menjadi Rp.643,49 juta pada tahun 2017 dan Rp.572,48 juta pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp.604,48 juta.



Gambar 3 Capaian PNB PPN Pekalongan 2015 - 2019

Dalam rangka pengusahaan fasilitas, penyelesaian sertifikat tanah seluas 4,7 Hektar yang terletak di timur sungai yang prosesnya telah dilaksanakan sejak tahun 2012 akhirnya terbit pada tanggal 2 Januari 2020.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan Pelabuhan Perikanan pada hakekatnya dilakukan dalam rangka pemusatan kegiatan perikanan, sehingga dapat dilakukan usaha perikanan pada skala ekonomi yang efisien dan sekaligus memanfaatkan dampak kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya. Hal ini disebabkan karena keberadaan pelabuhan perikanan membawa dampak ganda terhadap kegiatan usaha lain yang berbasis pada usaha penangkapan ikan maupun dalam bidang usaha lainnya. Dengan demikian, pembangunan pelabuhan perikanan dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi suatu wilayah.

Potensi pengembangan perikanan tangkap yang dimiliki oleh PPN Pekalongan pada dasarnya mencakup beberapa kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Potensi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut :

A. Potensi Sumber Daya Ikan

Pemberantasan IUU Fishing, intensifikasi alat tangkap ramah lingkungan, serta upaya pro-environment lainnya telah berhasil meningkatkan stok sumber daya ikan dalam 5 tahun terakhir. Secara faktual, nelayan di beberapa lokasi pun telah merasakan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan.

B. Potensi Sarana dan Prasarana

Potensi sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS FASILITAS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
A.	FASILITAS POKOK			
1	Dermaga sebelah Barat 346 m'	346	m'	Baik
2	Dermaga sebelah Timur 190 m'	190	m ²	Baik
3	Penahan Gelombang/Pier Barat (Break Water) sebelah Barat 320 m'	320	m ²	Baik
4	Penahan Gelombang/Pier Timur(Break Water) sebelah Timur 275 m'	275	m'	Baik
5	Alur Pelayaran (kedalaman rata-rata – 2 lws)	2	LWS	Mengalami pendangkalan/Umum
6	Bangunan Pemecah Gelombang/Pier Timur (Onshore) 350 m'	350	m'	Baik
7	Jalan Komplek Pelabuhan Sebelah Barat & wisata bahari 10.941 m ²	10.941	m ²	Baik
8	Jalan Komplek Pelabuhan Sebelah Timur 3.857 m ²	3.857	m ²	Baik
9	Drainase Unit Pengolah Limbah & Kawasan 1500 m ¹ .	1.500	m'	Baik
10	Lahan/Tanah	61.217	m ²	Baik
B	FASILITAS FUNGSIONAL			
1	Sarana Navigasi 1 Unit / Lampu navigasi Barat 4 M2	1	Unit	Baik
2	Perbengkelan 1 unit	1	Unit	(dikelola Perum Perindo)
3	Slip Way (Docking) 1 unit	1	Unit	(dikelola Perum Perindo & Swasta)
4	Tempat perbaikan / penjemuran jaring 300 m ²	320	m ²	(dikelola Perum Perindo)
5	Tempat parkir 1500 m ²	1.500	m ²	(dikelola Perum Perindo)
6	Tempat parkir 70 m ²	70	m ²	Baik
7	Menara Air Bersih dan Jaringan instalasi air 2 unit.	2	Unit	Baik
8	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebelah Selatan seluas 1.930 m ²	1.930	m ²	(dikelola Perum Perindo)
9	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebelah Utara seluas 3.704 m ²	3.704	m ²	(dikelola Perum Perindo)
10	Tempat Pelelangan Ikan Higienis seluas 400 m ² .	400	m ²	Baik
11	Tempat Peristirahatan Nelayan seluas 100 m ² .	100	m ²	Baik
12	Pasar Pengecer Ikan 135 m ² .	135	m ²	Baik

NO	JENIS FASILITAS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
13	Rumah Genset 30 m ² dan genset 100 KVA.	30	m ²	Baik
14	Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan seluas 513 m ² (2 lantai).	513	m ²	Baik
15	Balai Pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	247,08	m ²	Baik
16	Pagar Keliling Timur Sepanjang 710 m', Barat Sepanjang 600 m' dan Pagar Break Water Timur 208 m'	1.518	m'	Baik
17	Pos Pemeriksaan Terpadu 175,28 m ² .	175,28	m ²	Baik
18	Bangunan Penyaluran BBM Seluas 342,73 m ²	342,73	m ²	(dikelola Perum Perindo & KUD Makaryo Mino)
19	Gudang Keranjang Ikan 243 m ²	243	m ²	(dikelola Perum Perindo)
20	Gedung Laboratorium Mini 100 m ²	100	m ²	Baik
C	FASILITAS PENUNJANG			
1	Balai Pertemuan Nelayan	247	m ²	Baik
2	Gudang Kantor (Ruang Arsip)	25	m ²	Baik
3	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
4	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
5	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
6	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
7	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
8	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
9	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
10	Gazebo Wisata Bahari	4	m ²	Baik
11	Gedung SWRO	245	m ²	Baik
12	Gedung Wisata Bahari	300	m ²	Baik
13	Showroom Nelayan (Gedung Syahbandar)	48	m ²	Baik
14	Gedung Aquarium	300	m ²	Baik
15	Wahana Edukasi Anak	286	m ²	Baik
16	Kios Waserda	75	m ²	Baik
17	Depo Nelayan	168	m ²	Baik
18	Pasar Pengecer	135	m ²	Baik
20	Pos keamanan TPI (Pos Satpam I)	18	m ²	Baik
21	Pos Kemamana Timur (Pos Satpam II)	30	m ²	Baik

NO	JENIS FASILITAS	VOLUME	SATUAN	KONDISI
22	Pos Keamanan Pintu Msuk PPNP seluas 20 m2	20	m ²	Rusak ringan (dikelola Perum Perindo)
23	Pos Wisata Bahari (Gerbang & Gapuro)	9	m ²	Baik
24	Garasi PPNP Kantor	217	m ²	Baik
25	Tempat Cuci Mobil	12	m ²	Baik
26	Ikon Wisata Bahari	1	m ²	Baik
27	Taman Premanen TPI	1.430	m ²	Baik
28	Taman Premanen WB	7.255	m ²	Baik
29	Rumah Dinas (eselon III/Gol IV 108 m2 & Eselon IV/gol III/d 215 m2)	323	m ²	Baik
30	Papan Nama	12	m ²	Baik
31	Sumur Artetis TPI	1	unit	Baik
32	Sumur Dengan pompa	1	unit	Baik
33	Plengsengan Timur	200	m'	Baik
34	Talud Timur	70	m'	Baik
35	Sheetpile Wisata Bahari	81	m'	Baik
36	Talud Batu (wisata bahari)	256	m'	Baik
37	Sumur Artetis (timur sungai)	1	unit	Baik
38	Sumur Artetis (+menara) (wisata bahari)	1	unit	Baik
39	Sumur Artetis (sebelah lab)	1	unit	Baik
40	Tower Air Kantor	1	m ²	Baik
41	Tower Air MCK TPI	1	m ²	Baik
42	MCK (Wisata Bahari 51 m2 & TPI 175 M2)	226	m ²	Baik

C. Potensi Pelayanan dan Pengembangan Usaha

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat perikanan sekitar wilayah pengelolaan dan wilayah pengoperasian pelabuhan, beberapa pelayanan terhadap masyarakat nelayan yang dilaksanakan antara lain:

1. Jenis Pelayanan Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Pelayanan masyarakat perikanan;
 - b. Pelayanan Penggunaan Balai Pertemuan;
 - c. Pelayanan Pengaduan.
2. Jenis Pelayanan Seksi Operasional Pelabuhan
 - a. Pelayanan Informasi Pelabuhan Perikanan (online);
 - b. Pelayanan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

- c. Surat Keterangan Inspeksi Pembongkaran Ikan.
- 3. Jenis Pelayanan Seksi Kesyahbandaran
 - a. Pelayanan STBLK kedatangan dan keberangkatan;
 - b. Pelayanan SPB (online);
 - c. Pelayanan SHTI (online).
- 4. Jenis Pelayanan Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
 - a. Pelayanan Pas Masuk;
 - b. Pelayanan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan;
 - c. Pelayanan Penggunaan Peralatan Pelabuhan (Jasa Penggunaan Alat Berat)
 - d. Pelayanan Log Book Penangkapan Ikan;

Dalam aspek pengembangan usaha perikanan tangkap, PPN Pekalongan memiliki potensi jumlah nelayan yang relatif besar. Jumlah nelayan tersebut mencapai 10.705 nelayan yang aktif pada tahun 2021. Dengan potensi jumlah nelayan yang besar tersebut merupakan modal besar dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di PPN Pekalongan.

Permasalahan dalam pengembangan pelabuhan perikanan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem maupun berbagai ancaman yang berasal dari. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

A. Permasalahan Sumber Daya Ikan

Sumberdaya ikan merupakan faktor penting untuk keberlanjutan sumberdaya perikanan tangkap. Jaminan ketersediaan sumberdaya ikan menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Permasalahan penurunan produksi perikanan terjadi di PPN Pekalongan beberapa tahun terakhir. Selama kurun waktu selama 10 tahun (2012-2021) terjadi penurunan produksi rata-rata 3,04%, namun secara nilai terjadi kenaikan sebesar 6,40%. Meskipun terjadi fluktuasi jumlah produksi perikanan selama sepuluh tahun terakhir terhitung dari tahun 2012 – 2021, namun jika dilihat selama satu dekade terakhir terjadi penurunan produksi perikanan sebesar 7% per tahun. Penurunan produksi antara lain disinyalir karena kondisi sumberdaya ikan di beberapa WPP yang menjadi daerah penangkapan ikan kapal perikanan Pekalongan sudah jauh dan melakukan pendaratan ikan di tempat terdekat dengan daerah penangkapan.

B. Permasalahan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia sangat berpengaruh terhadap capaian output kegiatan perikanan. Beberapa permasalahan sarana dan prasarana yang menjadi kendala pengembangan kegiatan perikanan tangkap PPN Pekalongan diantaranya adalah:

1. Kondisi kolam/alur pelabuhan (Sungai Pekalongan) tercemar, sehingga tidak higienis dan tingkat sedimentasi cukup tinggi selain itu alur sungai bukan merupakan asset pelabuhan

- sehingga perlu dukungan instansi lain atau yang menerima manfaat langsung keberadaan alur sungai untuk melakukan perawatan (pengerukan);
2. Tertib asset dan pengelolaan antara UPT PPN Pekalongan dengan Perum Perindo, beberapa asset/bangunan PPN Pekalongan berada di tanah milik PERUM PERINDO;
 3. Alokasi anggaran yang belum cukup tersedia khususnya untuk pengembangan/pelabuhan On-shore (berdasarkan reviu masterplan PPN Pekalongan ditargetkan tahun 2019 selesai);
 4. Sebagian besar nelayan (ABK) yang melakukan aktivitas di PPNP bukan merupakan nelayan atau warga Kota Pekalongan sehingga pemilik kapal mencari tenaga kerja di luar kota pekalongan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan WPP di 718 dan 573 menggunakan kapal yang berukuran diatas 60 GT sampai dengan 150 GT, sehingga apabila kapal tersebut penuh dengan muatan tidak bisa masuk secara lancar dan harus ditarik atau dengan memindahkan muatannya ke kapal lain (lansir) agar dapat masuk ke pelabuhan.

C. Permasalahan Pelayanan dan Pengembangan Usaha

1. Kurang optimalnya penggunaan sistem IT baik dalam pelayanan kepada stakeholder maupun dalam proses internal didalam organisasi. Dengan berkembangnya teknologi maka pelayanan terhadap pengguna jasa diharapkan akan semakin baik selain dengan teknologi yang mencukupi juga SDM dapat mendukung penguasaan teknologi untuk melakukan pelayanan kepada pengguna jasa menjadi semakin cepat.
2. Ketersediaan lahan dan sarana penunjang kegiatan usaha tidak tersedia. Kegiatan perusahaan di PPN Pekalongan dilaksanakan oleh PERUM PERINDO

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

- a. Fungsi Pemerintahan
 1. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 2. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 3. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 4. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 5. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;

6. Pelaksanaan kesyahbandaran;
7. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
8. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
9. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
10. Pemantauan wilayah pesisir;
11. Pengendalian lingkungan;
12. Kepabeanan; dan/atau
13. Keimigrasian.

b. Fungsi Pengusahaan

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkar muat ikan;
3. Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
4. Pemasaran dan distribusi ikan;
5. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
7. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
8. Wisata bahari; dan/atau
9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut :

1.3.1 Sub Bagian Umum

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan Barang Milik Negara dan perlengkapan.

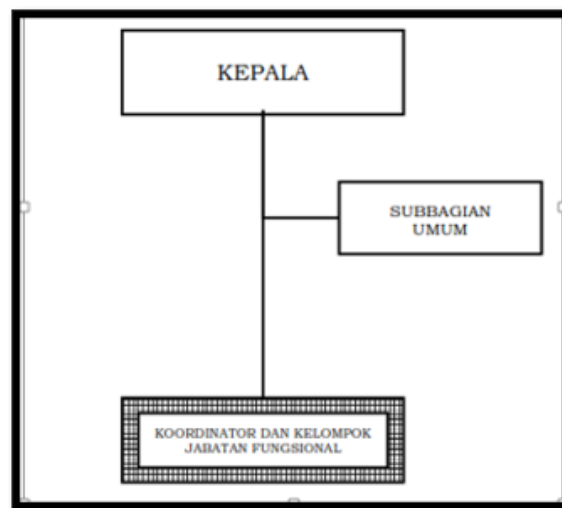
1.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai tugas dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPN Pekalongan dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mewujudkan pelabuhan perikanan sebagai salah satu kawasan *Eco Fishing Port*, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon-I lingkup DJPT yang berkaitan dengan kebijakan di UPT PPN Pekalongan secara implisit juga menjadi tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan.



Gambar 4 Struktur Organisasi PPN Pekalongan

1.4 Maksud dan Tujuan

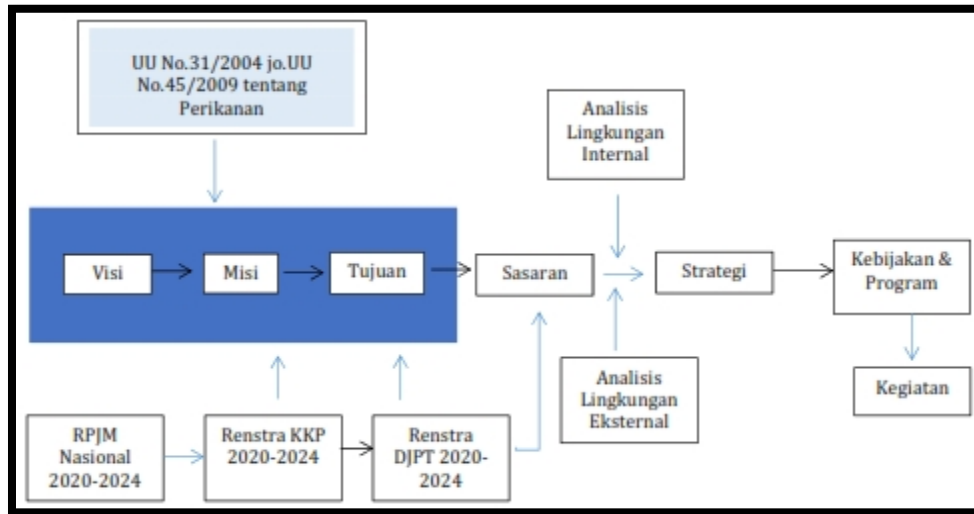
Dengan mempertimbangkan dinamika tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan langkah strategis untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat, melalui penjabaran kebijakan secara berjenjang.

Maksud dan tujuan Rencana Strategis PPN Pekalongan Tahun 2020-2024, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dana operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam pelaksanaanya Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada *stakeholder* yang terlibat dalam aktivitas operasional pelabuhan.

1.5 Alur Pikir

Alur pikir penyusunan Renstra PPN Pekalongan tersaji pada gambar berikut:



Gambar 5 Alur pikir penyusunan Renstra PPN Pekalongan 2020-2024

2.1 Pembangunan Perikanan Tangkap

2.1.1 Visi Ditjen Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

2.1.2 Misi Ditjen Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

2.1.3 Tujuan Ditjen Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap, yaitu
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif
 - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap
3. Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas

2.1.4 Sasaran Strategis Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJPT sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program DJPT 2020-2024 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. KESEJAHTERAAN NELAYAN MENINGKAT

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

2. SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)

3. TATA KELOLA SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP BERTANGGUNG-JAWAB

Dengan Indikator Kinerja :

- a. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur

4. PRODUKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP MENINGKAT

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)

5. EKONOMI SEKTOR KP MENINGKAT

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap (Triliun)
- b. Tenaga kerja yang terlibat di DJPT (Orang)

II. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap
- b. Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (Unit Kerja)
- c. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021 (Persen)
- d. Nilai PMSAKIP Ditjen Perikanan Tangkap
- e. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap
- f. IP ASN DJPT
- g. Persentase Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar
- h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
- i. Unit kerja lingkup DJPT yang menerapkan inovasi pelayan public
- j. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/sinergitas lingkup Ditje PT
- k. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup DJPT (Persen)
- l. Tingkat kepatuhan BMN lingkup DJPT (Persen)
- m. Nilai IKPA DJPT (Nilai)
- n. Nilai NKA (Nilai)

2.2 Pembangunan PPN Pekalongan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Sebagai tindak lanjut Permen tersebut, PPN Pekalongan menyusun Renstra 2020-2024 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2.2.1 Visi PPN Pekalongan

Visi PPN Pekalongan adalah mendukung tercapainya visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat

Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

2.2.2 Misi PPN Pekalongan

Misi PPN Pekalongan juga mengadopsi misi Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

2.2.3 Tujuan PPN Pekalongan

Menjabarkan misi Ditjen Perikanan Tangkap, maka tujuan PPN Pekalongan juga mendukung tujuan Ditjen Perikanan Tangkap yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu
 - a. Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif
 - c. Mengakselerasi reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap
3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2.4 Sasaran Strategis PPN Pekalongan

Sasaran strategis PPN Pekalongan dapat dijabarkan dalam sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. NILAI PNBP SEKTOR PERIKANAN TANGKAP MENINGKAT DI PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai PNBP di PPN Pekalongan. (Rp. Juta)

2. KETERSEDIAAN DATA PRODUKSI (PELABUHAN PERIKANAN) YANG AKURAT

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan PPN Pekalongan. (Ton)

3. PENGELOLAAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG BERDAYA SAING DI PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan. (Produk)

4. PENGELOLAAN AWAK KAPAL PERIKANAN YANG TERSERTIFIKASI/TERLINDUNGI DI PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya. (Orang)
- b. Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha. (Orang)

5. PEMENUHAN PRASARANA PEMUNGUTAN PNBP PERIKANAN TANGKAP YANG OPTIMAL DI PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di PPN Pekalongan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap. (Unit)

6. PENGELOLAAN PPN PEKALONGAN YANG BERDAYA SAING

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Tingkat Operasional PPN Pekalongan. (Nilai)

7. PENGELOLAAN KENELAYANAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING DI PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya. (Orang)

8. TATA KELOLA SUMBER DAYA IKAN DI WPPNRI PERAIRAN LAUT YANG BERTANGGUNG JAWAB DI PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi. (Laporan)

9. TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI LINGKUNGAN PPN PEKALONGAN

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pekalongan. (Nilai)
- b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK. (Persen)
- c. Nilai PMSAKIP PPN Pekalongan. (Nilai)
- d. IP ASN PPN Pekalongan. (Indeks)
- e. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di PPN Pekalongan. (Persen)
- f. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pekalongan. (Persen)
- g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pekalongan. (Persen)
- h. Nilai IKPA PPN Pekalongan. (Nilai)
- i. Nilai Kinerja Anggaran PPN Pekalongan. (Nilai)

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan PPN Pekalongan yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan progam pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan startegis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agas proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah perumusan alternative arah kebijakan.

Tabel 1 Matriks SWOT Lingkup PPN Pekalongan

Faktor Internal	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PPN Pekalongan sudah memiliki WKOPP ▪ PPN Pekalongan telah masuk dalam RZWP3K Jateng dan RTRW Kota Pekalongan ▪ Masterplan pengembangan (Pel. Onshore) PPNP telah tersedia dan telah tersertifikasi seluas 4,74 Ha ▪ Sudah memiliki dokumen lingkungan ▪ Beberapa Pelayanan PPNP sudah berstandar ISO 9001:2015 ▪ Dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan pelabuhan onshore seperti penyediaan lahan seluas 3,5 Ha dan jalan akses ▪ Sistem pelelangan ikan cash and carry (kontan) 	<p>Weaknesses (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya laju sedimentasi dari sungai & laut ▪ Kondisi air kolam pelabuhan (sungai pekalongan) tercemar sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah industri serta limbah cair, sehingga tidak higienis ▪ Sebagian besar ikan dipasarkan primer/ langsung (tidak diolah terlebih dahulu) ▪ Ikan yang didaratkan dan jumlah kapal cenderung menurun ▪ Belum ada industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku dari TPI Pekalongan ▪ Banyak pegawai yang akan memasuki masa purna tugas
Faktor Eksternal		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan penerapan RB mandiri di PPN Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar fasilitas existing berada di tanah milik PERUM PERINDO ▪ Sebagian besar peralatan dan mesin yang dimiliki sudah melebihi umur teknis dan ekonomis ▪ Tingkat pendidikan pegawai banyak yang masih dibawah D3 ▪ Minimnya pemangku jabatan yang telah mengikuti diklat/bimtek sesuai dengan jabatannya
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah terbit dan pemberlakuan Perda 11 Tahun 2015 tentang Tempat Pelelangan Ikan ▪ Tersedia lahan yang memadai untuk industri perikanan (Perum Perindo & Perinus) ▪ Lokasi PPN Pekalongan yang mudah diakses dan dijangkau sarana transportasi ▪ Kota Pekalongan ditetapkan menjadi kawasan Minapolitan dengan zona inti PPN Pekalongan sebagai sentra industry perikanan tangkap ▪ Kota Pekalongan sebagai Technopark Perikanan ▪ Sektor perikanan merupakan salah satu potensi ekonomi kreatif Kota Pekalongan ▪ Meningkatnya jumlah ikan beku yang didaratkan ▪ Jumlah kapal yang berdomisili di Pekalongan didominasi oleh kapal yang berukuran besar (diatas 30 GT sampai dengan 300 GT) 	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menindaklanjuti bentuk dukungan pemerintah daerah dengan adanya sinkronisasi program pengembangan PPN Pekalongan ▪ Pembangunan infrastruktur sesuai masterplan (pentahapan s/d tahun 2024) ▪ Mengundang investor untuk mengembangkan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan ▪ Meningkatkan jumlah pelayanan yang berstandar ISO 9001:2015 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeliharaan rutin/ pengerukan alur/ kolam pelabuhan setiap tahun ▪ Fasilitasi kerjasama antara pengusaha dengan Perum Perindo dan PT. Perinus ▪ Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) ▪ Mengusulkan pembangunan pelabuhan onshore ▪ Mengusulkan kegiatan diklat sesuai dengan kompetensi pegawai yang dibutuhkan, mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek ▪ Peningkatan keterampilan dan kesadaran nelayan untuk penanganan ikan dengan sosialisasi dan bimtek

<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan anggaran terbatas dan kebijakan prioritas KKP ▪ Kapal domisili pekalongan tidak semua mendaratkan hasil tangkapan di PPN Pekalongan ▪ Banyaknya pelabuhan perikanan UPT daerah di wilayah pantura Jateng (45 PP) ▪ Adanya perbedaan kebijakan dalam penerapan aturan antara PP pusat dan PP daerah ▪ Semakin jauhnya fishing ground mengakibatkan biaya operasional semakin tinggi ▪ Pasang air laut dan penurunan permukaan tanah 	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melibatkan intervensi K/L lain seperti Kementerian PUPERA, Dinas PU Provinsi, dll. untuk segera membangun infrastruktur pendukung pengembangan pelabuhan. ▪ Mengusulkan satu pelabuhan pangkalan sesuai domisili ▪ Mengusulkan percepatan pembangunan pelabuhan onshore ▪ Sinkronisasi dan sinergitas Pelayanan UPT Pusat dan Daerah ▪ Mendukung keberadaan kapal penyangga dan observer on board. 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemeliharaan rutin/ pengerukan alur/ kolam pelabuhan setiap tahun, baik swakelola maupun kontraktual dengan volume besar. Mengusulkan untuk turut melakukan pemeliharaan alur pada Dinas Perikanan Kota Pekalongan sebagai pengelola TPI ▪ Keterpaduan dan sinkronisasi peraturan daerah dan pusat ▪ Pembinaan dan supervisi ke pelabuhan binaan untuk mensinergikan kegiatan pendataan ▪ Pelabuhan pangkalan pada SIPI diusulkan sesuai domisili ▪ Revitalisasi fasilitas existing
--	--	---

4.1 Kebijakan dan Strategi

PPN Pekalongan dalam statusnya sebagai UPT Pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka arah dan kebijakan organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan sasaran persentase pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima dalam operasional pelabuhan perikanan dengan fasilitas produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar, maka kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan adalah melalui :

4.1.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan terhadap pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; pelayanan jasa dan fasilitas usaha perikanan; fasilitas dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; fasilitas publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan, maka upaya peningkatan pelayanan terhadap aktifitas tersebut terus diupayakan secara optimal.

Kebijakan PPN Pekalongan dalam peningkatan pelayanan tersebut ditempuh antara lain melalui upaya penerapan Standar Operation Procedure (SOP), peningkatan kapasitas SDM pelabuhan, penyediaan peralatan pendukung pelayanan, pemasangan papan penerangan/informasi pelayanan, penyebaran data dan informasi tepat sasaran, pertemuan dengan stake holders melalui kegiatan Ngopi Bareng dan sosialisasi ketentuan/peraturan yang terkait dengan pelayanan kepelabuhanan.

4.1.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Guna mewujudkan PPN Pekalongan sebagai kawasan minapolitan, maka upaya peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan terus diupayakan secara optimal untuk memfasilitasi seluruh kegiatan pelayanan kepelabuhanan, sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan maupun usaha pendukung lainnya mulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi, sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, perkembangan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya menuju pada kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut meliputi penyempurnaan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada di pelabuhan.

4.1.3 Peningkatan Sistem Informasi Pelabuhan

Kebijakan pengembangan sistem informasi perikanan diarahkan pada peningkatan kualitas, akurasi data sebagai informasi perikanan di PPN Pekalongan dengan beberapa ragam penyampaian informasi baik dalam bentuk buku statistik, leaflet maupun poster dengan pengembangan jejaring distribusi informasi diantaranya melalui media cetak dan elektronik, sosialisasi, dan visitor.

4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.2.1 Target Kinerja PPN Pekalongan

4.2.1.1 Indikator Kinerja PPN Pekalongan

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis PPN Pekalongan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pekalongan	1 Nilai PNBP di PPN Pekalongan. (Rp. Juta)	567	535	408,002	415	420
2	Ketersediaan data produksi (pelabuhan perikanan) yang akurat	2 Rata-rata volume produksi perikanan tangkap triwulan PPN Pekalongan. (Ton)	-	-	912,50	927,67	945,67
3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pekalongan	3 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan. (Produk)	-	-	50	50	50
4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Pekalongan	4 Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya. (Orang)	60	30	30	30	30
		5 Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha. (Orang)	-	-	30	30	30

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di PPN Pekalongan	6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di PPN Pekalongan untuk menunjang PNBP perikanan tangkap. (Unit)	-	-	1	1	1
6	Pengelolaan PPN Pekalongan yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional PPN Pekalongan. (Nilai)	80	81	82	82	82
7	Pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing di PPN Pekalongan	8	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya. (Orang)	50	24	24	24	24
8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di PPN Pekalongan	9	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi. (Laporan)	63	60	130	130	130
9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pekalongan. (Nilai)	-	75,07	75,07	75,07	75,07
		11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK. (Persen)	-	-	100	100	100
		12	Nilai PMSAKIP PPN Pekalongan. (Nilai)	85	85,15	85,25	85,35	85,45
		13	IP ASN PPN Pekalongan. (Indeks)	72	72,5	79	80	81
		14	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di PPN Pekalongan. (Persen)	-	-	75	75	75
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pekalongan. (Persen)	-	72,5	75	77,5	80
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pekalongan. (Persen)	-	72,5	75	77,5	80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		17 Nilai IKPA PPN Pekalongan. (Nilai)	88	89	89	90	90
		18 Nilai Kinerja Anggaran PPN Pekalongan. (Nilai)	-	86	86	87	87

4.2.2 Kerangka Pendanaan PPN Pekalongan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di PPN Pekalongan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja Eselon IV.

Matriks kinerja dalam struktur program PPN Pekalongan tahun 2020 - 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.

BAB V PENUTUP

Renstra PPN Pekalongan Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PPN Pekalongan, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra PPN Pekalongan Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PPN Pekalongan. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan PPN Pekalongan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran internal PPN Pekalongan sendiri serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan PPN Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

LAMPIRAN

Lampiran I : Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan (Output)	Target					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Lokasi	APBN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pengelolaan Perikanan angkap						17.365.182.000	57.681.715.743	139.967.789.350	81.092.325.793	24.632.370.775	Pekalongan	
A Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan						77.900.000	89.459.000	103.205.390	119.586.522	139.143.091		Pusat
1 Awak kapal perikanan yang tersertifikasi	40	40	40	40	40	7.000.000	8.470.000	10.248.700	12.400.927	15.005.122		Pusat
Sertifikasi Awak Kapal Perikanan di Daerah						7.000.000	8.470.000	10.248.700	12.400.927	15.005.122		Pusat
2 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1	1	1	1	1	40.900.000	49.489.000	59.881.690	72.456.845	87.672.782		Pusat
Pengenalan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di sentra nelayan Satker Provinsi						40.900.000	49.489.000	59.881.690	72.456.845	87.672.782		Pusat
3 Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan"	50	50	50	50	50	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188		Pusat
B Pengelolaan Pelabuhan Perikanan						7.466.532.000	46.018.926.313	126.219.837.838	64.878.715.800	5.501.942.219		Pusat
1 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang diidentifikasi dan/atau ditingkatkan fasilitasnya	1	1	1	1	1	1.000.000.000	41.139.391.883	121.170.899.258	59.624.798.198	0		Pusat
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara						1.000.000.000	41.139.391.883	121.170.899.258	59.624.798.198	0		Pusat

Program/Kegiatan (Output)	Target					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Lokasi	APBN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
- Rehabilitasi Jetty/Gardu pandang						1.000.000.000		0	0	0		Pusat
- Pekerjaan Bangunan pemecah gelombang sisi timur (lanjutan) onshore (persiapan, fisik dan abutment)							41.139.391.883					Pusat
- Pekerjaan Bangunan pemecah gelombang sisi barat onshore								77.250.098.571				Pusat
- Pekerjaan pengerukan kolam dan reklamasi								43.920.800.687				Pusat
- Pekerjaan dermaga									31.719.466.115			Pusat
- Pekerjaan trestle									3.156.551.419			Pusat
- Pekerjaan relokasi sikenteng									7.915.417.953			Pusat
- Pekerjaan jembatan sikenteng									2.274.656.481			Pusat
- Pekerjaan gedung TPI									7.355.668.658			Pusat
- Pekerjaan sumber air bersih dan menara air									909.025.471			Pusat
- Pekerjaan rumah genset									117.574.285			Pusat
- Pekerjaan pagar keliling lanjutan									203.867.970			Pusat
- Pekerjaan mekanikal dan elektrikal									1.522.687.500			Pusat
- Pekerjaan jalan dan drainase									3.201.858.677			Pusat
- Pekerjaan rambu navigasi									266.276.160			Pusat
- Pekerjaan fasum (masjid, mck, shelter)									981.747.509			Pusat

Program/Kegiatan (Output)	Target					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Lokasi	APBN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkatkan operasionalnya	80	80	80	81	81	4.139.531.000	4.279.534.430	4.448.938.580	4.653.917.602	4.901.942.219		Pusat
- Kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan						666.683.000	806.686.430	976.090.580	1.181.069.602	1.429.094.219		
- Perencanaan Fasilitas (Penyusunan DED)						168.177.000						Usulan PNPB Pusat
- Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan						388.356.000						Usulan PNPB Pusat
- Pengadaan Kapal Keruk						12.000.000.000						Usulan PNPB Pusat
- Pemeliharaan Alur Swakelola						3.472.848.000	3.472.848.000	3.472.848.000	3.472.848.000	3.472.848.000		Usulan PNPB Pusat
3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	2.327.001.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		Pusat
Kendaraan Bermotor							500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		Pusat
Alat Pengolah Data dan Komunikasi							100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Pusat
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran						50.000.000						Pusat
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan						2.277.001.000	0	0	0	0		Pusat
- Renovasi Gedung Kantor						200.000.000						Pusat
- Rehabilitasi Kawasan Wisata Bahari						2.077.001.000						Usulan PNPB Pusat
C Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan						47.074.000	56.959.540	68.921.043	83.394.463	100.907.300		Pusat
1 Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	1	1	1	1	1	43.074.000	52.119.540	63.064.643	76.308.219	92.332.944		Pusat

Program/Kegiatan (Output)	Target					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Lokasi	APBN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
- Perjadi dalam rangka koordinasi pusat-daerah dan pendampingan/ sinergitas pelabuhan						16.124.000	19.510.040	23.607.148	28.564.650	34.563.226		Pusat
- Sosialisasi peningkatan perizinan perikanan tangkap						26.950.000	32.609.500	39.457.495	47.743.569	57.769.718		Pusat
2 Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap	60	60	60	60	60	4.000.000	4.840.000	5.856.400	7.086.244	8.574.355		Pusat
- Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)						4.000.000	4.840.000	5.856.400	7.086.244	8.574.355		Pusat
D Pengelolaan Sumber Daya Ikan						43.944.000	53.172.240	64.338.410	77.849.477	94.197.867		Pusat
1 Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	60	60	60	60	60	9.228.000	11.165.880	13.510.715	16.347.965	19.781.038		Pusat
Perjadi dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan						9.228.000	11.165.880	13.510.715	16.347.965	19.781.038		Pusat
Evaluasi Rencana aksi RPP WPPNRI						9.962.000	11.456.300	13.174.745	15.150.957	17.423.600		Pusat
2 Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan	40	40	40	40	40	34.716.000	42.006.360	50.827.696	61.501.512	74.416.829		Pusat
Pengumpulan data logbook penangkapan ikan						34.716.000	42.006.360	50.827.696	61.501.512	74.416.829		Pusat
E Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap						9.729.732.000	11.463.198.650	13.511.486.668	15.932.779.532	18.796.180.298		Pusat

Program/Kegiatan (Output)	Target					Alokasi Anggaran (Rp.Juta)					Lokasi	APBN
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I"	1	1	1	1	1	329.735.000	395.682.000	474.818.400	569.782.080	683.738.496		Pusat
Layanan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Perikanan Tangkap						151.000.000	181.200.000	217.440.000	260.928.000	313.113.600		Pusat
Layanan SDM Aparatur Ditjen Perikanan Tangkap						47.000.000	56.400.000	67.680.000	81.216.000	97.459.200		Pusat
Layanan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum						107.735.000	129.282.000	155.138.400	186.166.080	223.399.296		Pusat
Layanan Hukum, Organisasi dan Kerjasama						24.000.000	28.800.000	34.560.000	41.472.000	49.766.400		Pusat
2 Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	9.399.997.000	11.067.516.650	13.036.668.268	15.362.997.452	18.112.441.802		Pusat
Gaji dan Tunjangan						5.150.402.000	6.180.482.400	7.416.578.880	8.899.894.656	10.679.873.587		Pusat
Operasional dan Pemeliharaan Kantor						4.249.595.000	4.887.034.250	5.620.089.388	6.463.102.796	7.432.568.215		Pusat

PEKALONGAN

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

Jl. WR. Supratman No.1, Pekalongan 51141

e-mail : ppnpekalongan@kkp.go.id

website : www.ppnpekalongan.kkp.go.id